

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor Pariwisata adalah salah satu sector pembangunan yang sangat diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis yang berkepanjangan. Sektor-sektor lain seperti industri dan jasa saat ini masih mengalami kesulitan-kesulitan yang cukup dalam dan tampaknya masih perlu waktu lama untuk pulih kembali. Sedangkan sector pariwisata, walaupun juga tidak terlepas dari pengaruh krisis ekonomi, masih memberikan secercah harapan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Optimisme ini paling tidak terlihat dari beberapa hal, yaitu: pertama, sector pariwisata merupakan sector yang paling siap dari segi fasilitas, sarana, parasarana, dan infrastrukturnya; kedua, sector pariwisata merupakan sector yang mempunyai daya tarik khas yang bersumber dari kekayaan alam dan budaya nasional; ketiga, sector pariwisata baik secara langsung, dapat menjadi penggerak seluruh potensi ekonomi yang ada di masyarakat.

Mengingat kondisi tersebut, maka pengembanaan pariwisata yang berbasis kerakyatan (*community based tourism development*) harus menjadi landasan dan acuan yang dilakukan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh mereka. Strategi ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional.

Keinginan pemerintah kota untuk mewujudkan kemandiriannya perlu diberikan kewenangan penuh, terutama dalam mengelola sumber daya yang ada, menentukan kebijakan sendiri, memprioritaskan seluruh aparatur daerah agar mempunyai profesionalisme yang tinggi dan dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan fenomena tersebut diatas, Pemerintah Kota Pangkalpinang sekuat tenaga berusaha untuk menata dan mengelola aspek yang berhubungan dengan sumber daya yang ada pada Kota Pangkalpinang terutama dalam menangani pariwisata kota. Bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mempunyai potensi besar disektor pariwisata merupakan pertimbangan logis untuk dikembangkan sebagai salah satu sector andalan. Ini nampak pada banyaknya objek wisata yang terdapat didaerah tersebut salah satunya adalah Pantai Pasir Padi.

Peranan Pemerintah Kota dalam mengembangkan sector pariwisata sanagtlah diperlukan, mengingat pariwisata dalam pembangunan daerah pada garis besarnya menitiberatkan pada dua segi yakni segi ekonomis (sumber devisa pajak), segi social (penciptaan lapangan kerja). Untuk memperlancar dan mempercepat hasil pembangunan pariwisata tersebut maka Kantor Pariwisata Kota Pangkalpinang selaku penggerak utama dalam mengembangkan pariwisata perlu melakukan strategi jitu dalam pengembangan pariwisata kota mengingat persaingan dunia wisata yang cukup kompetitif.

Sebagaimana sebuah bentuk pengembangan ekonomi maka pengembangan industri pariwisata pun sebagai bagian dari sebuah gejala ekonomi bisnis memerlukan rencana yang baik apabila ingin sukses dalam objek yang

implicit maupun eksplisit. Pengembangan pariwisata tidak akan optimal apabila pada suatu sector hanya dipengaruhi oleh pengusaha pribadi untuk kepentingan mereka sendiri. Di sektor lain, bila sector pariwisata didominasi oleh masyarakat. Hal ini tidak mungkin untuk mengembangkan secara optimal pada sector ekonomi.

Secara empiris dapat ditunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata harus dihilangkan rencana yang kuno dan tidak banyak menuntungkan tetapi dari tuntutan paradigma kita harus menggunakan rencana yang tidak fleksibel dan kreatif. Pengembangan adalah tidak terbatas dengan membuat tempat serta pembuatan lingkungan semata-mata. Rencana pengembangan seharusnya mencoba merubah suatu objek pandangan hidup menjadi lingkungan yang enak dan nyaman sehingga bisa menarik perhatian wisatawan asing.

Untuk melaksanakan rencana strategi tersebut, Kantor Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang perlu memanaj atau mengatur serta mendorong seksi-seksi yang ada untuk meningkatkan kinerja dalam pengembangan pariwisata kota. Sehingga dengan adanya system pengembangan pariwisata kota, pemerintah kota pangkalpinang harus benar-benar menyiapkan sumber daya manusia yang produktif dengan kata lain anak asli daerah itu sendiri yang memiliki pengalaman dan skill untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal sehingga perlu adanya dukungan dari semua pihak.

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui manajemen strategi apabila yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam persaingan dunia wisata yang cukup hebat. Upaya pengembangan

pariwisata menjadi sangat penting karena dapat turut mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, memberdayakan ekonomi masyarakat yang dinamis. Kepariwisataan merupakan salah satu andalan Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan PAD.¹ Oleh karena itu pemerintah kota Pangkalpinang harus berusaha mengembangkan potensi pariwisata yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang sekarang ini dalam peningkatan investasi dibidang pariwisata bisa dikatakan sangat rendah.

Di sisi lain secara umum upaya pengembangan pariwisata alam memiliki peluang dan keuntungan yang besar bagi Kota Pangkalpinang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai potensi alam yang dimiliki oleh Negara kita secara umum dan Kota Pangkalpinang dalam skala mikro. Dengan melihat berbagai potensi yang ada di Kota Pangkalpinang seperti keberadaan pantai-pantai, sungai, kebun bunga dan buah yang mendominasi kawasan serta budaya masyarakat yang masih tradisional, maka peluang pengembangan pariwisata alam dapat dijadikan alternative untuk wilayah Kota Pangkalpinang.

Dengan potensi-potensi yang dimilikinya tersebut Kota Pangkalpinang perlu membuat strategi-strategi pengembangan sector pariwisata yang saling mendukung pengembangan sector lain. Pembangunan pariwisata di Kota Pangkalpinang bertujuan untuk memperbesar penerimaan devisa, pendapatan daerah, memperluas lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menunjang pembangunan daerah yang terpeliharanya nilai-nilai budaya bangsa dan agama serta yang lebih penting soal

¹ *Rentsra Kota Pangkalpinang 2004 -2007*

kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pariwisata juga diarahkan untuk mendorong pengembangan pengenalan dan pemasaran produk daerah. Sedangkan kebijaksanaan khusus pembangunan pariwisata adalah pengelolaan seluruh kegiatan pariwisata dapat meningkatkan pemanfaatan seluruh potensi dan usaha jasa serta Sumber Daya Manusia (SDM) wisata secara maksimal.

Akan tetapi peranan pemerintah maupun pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan, pemanfaatan budaya, khusus dalam kaitannya dengan pariwisata masih belum terwujud dengan optimal dikarenakan kurangnya mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Pangkalpinang dalam menangani kepariwisataan. Hal itu di buktikan dalam pelayanan birokrasi yang tidak baik, carut-marut, tatanan taman wisata, maupun sarana dan prasarana yang minim. Disamping itu juga keadaan pariwisata Kota Pangkalpinang terdapat berbagai macam kendala hal ini dibuktikan dengan adanya minimnya bidang pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari Usaha Kepariwisataan kurang mencapai target yang diharapkan. Berikut ini dari hasil data yang diketahui

Tabel 1.1

Bidang Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Agustus 2007

PAD yang diperoleh dari Usaha Kepariwisata, terdiri dari :

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Persen	Keterangan
1	Pajak Daerah				
	-Pajak Hotel	Rp.400.000.000,-	Rp. 289.656.043,-	57,93	Dikelola Bakuda
	-Pajak Rest\RM	Rp1.200.000.000,-	Rp. 849.032.000,-	70,70	Dikelola Bakuda
	-Pajak Hiburan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 101.924.425,-	101,92	Dikelola Bakuda
2	Retribusi Daerah				
	-Izin Usaha	Rp.75.000.000,-	Rp. 51.450.000,-	68,60	Dikelola
	Kepariwisata				Disbudpar
	-Tempat	Rp.25.000.000,-	Rp. 15.125.000,-	60,50	Dikelola
	Rekreasi dan				Disbudpar
	Olahraga				

Sumber Data: *Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang*

Setelah melihat secara detail dari aspek pengembangan pariwisata kota Pangkalpinang peningkatan penghasilan pendapatan pariwisata jauh menuju target yang diharapkan. Hal ini sangat mempengaruhi pendapatan anggaran dan pendapatan investasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan juga rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sector pariwisata.

Upaya pengembangan pariwisata menjadi sangat penting karena dapat turut mendorong peningkatan Pendapatan Devisa Wisata dan PAD. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi upaya pengembangan pariwisata antara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan pariwisata
2. Pembangunan bidang pariwisata masih kurang melibatkan stakeholders baik pemerintah selaku pengambil kebijakan, pelaku industri pariwisata dan masyarakat setempat
3. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kepariwisataan
4. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani Kepariwisataan
5. Pembangunan ODTW yang hanya terfokus pada ODTW Pantai Pasir Padi
6. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sector kepariwisataan
7. Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan budaya, khusus dalam kaitannya dengan pariwisata masih belum terwujud dengan optimal

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah empiris diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengembangkan sector pariwisata periode 2008?
2. Apa saja factor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengembangkan pariwisata?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah :

1. Untuk memperoleh gelar S1 jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Untuk mengetahui bagaimana strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam mengembangkan pariwisata
3. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata

2. Manfaat Penelitian

Mengetahui bagaimana strategi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam mengembangkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di Kota Pangkalpinang

D. KERANGKA DASAR TEORI

Sebagai pedoman dan petunjuk dalam memecahkan masalah dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan teori-teori yang diharapkan dapat memberikan arah dalam menjelaskan fakta-fakta baru yang biasanya menyimpang dari keadaan sebelumnya. Pentingnya penggunaan teori dalam penelitian seperti yang diungkapkan oleh Zamroni mengatakan tentang teori mengenai Suatu penelitian yang akan mampu menghasilkan teori untuk menjelaskan fenomena yang dihadapi dengan memuaskan kalau teori yang dihasilkan oleh penelitian tersebut didasarkan dengan kerangka yang baik.²

Teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang kait-mengait yang menghadirkan suatu tujuan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesafik hubungan-hubungan diantara variable yang terkait dalam fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut. Dapat diketahui teori social ialah terdiri dari pernyataan yang bersifat abstrak dan umum yang bertujuan menerangkan bagaimana dan mengapa beberapa aspek dari kenyataan dalam bermasyarakat (baik kenyataan itu dapat diketahui secara langsung maupun tidak).³

1. Pengertian Manajemen Strategis

Ada beberapa ahli yang mendefenisikan pengertian manajemen

Strategi adalah sebagai berikut:

a) *Henry M Boitinger*.⁴

Berpendapat bahwa manajemen itu suatu seni yang membutuhkan tiga unsure yaitu :

1. Pandangan seniman
2. Pengetahuan dan teknis
3. Teknik dan komunikasi yang berhasil

Dalam hal ini manajemen merupakan suatu seni, maka manajemen memerlukan tiga unsure tersebut. Oleh karena itu ketrampilan manajemen seni juga dikembangkan melalui training. Ketrampilan manajemen dikembangkan dengan cara yang sama.

b) *Luther Gulick*⁵

³ *Ibid*

⁴ *Prinsip-prinsip Manajemen*, D. P. *Lik*, *Konsep dan Strategi* tahun 1995, Jakarta, hal 20

Mendefinisikan manajemen sebagai bidang pengetahuan yang mencari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana orang-orang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dan mewujudkan kerja sama itu berguna untuk kemanusiaan. Manajemen memenuhi syarat tersebut sebagai bidang pengetahuan karena telah dipelajari bertahun-tahun dan telah diatur menjadi serangkaian teori-teori

c) *I.H. Walson dan Oey Liang Lie*⁶

Manajemen dinyatakan bahwa, manajemen sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu karena manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran yang universal. Sebagai ilmu, manajemen memiliki asas-asas seperti ilmu lainnya yang disebut "asas manajemen". Manajemen dinyatakan sebagai seni karena keberhasilannya memimpin dalam usaha pencapaian tujuan dengan bantuan bawahan, selain itu diperlukan pemahaman dan pengalaman ilmu manajemen.

Dari definisi diatas dapat ditarik beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

- a) Proses adalah suatu cara sistematis untuk melakukan suatu manajemen yang didefinisikan sebagai suatu proses. Karena semua pemimpin memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian, yang terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- b) Perencanaan, menunjukkan bahwa para pemimpin memikirkan tujuan dan kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan pada suatu cara, rencana, dan logika.

- c) Pengorganisasian, berarti para pemimpin mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi.
 - d) Memimpin ini menunjukkan bagaimana cara pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk tugas tertentu.
- Pengawasan, para pemimpin berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi yang bergerak dengan arah atau jalur tujuan, apabila organisasi berjalan pada jalur yang salah maka para pemimpin berusaha mencari permasalahannya dan mengembalikan pada jalur yang benar.

Strategi adalah cara atau upaya bagaimana Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengembangkan wisata guna meningkatkan pendapatan aslinya. Dalam kamus besar Indonesia pengertian mengenai Strategi adalah⁷ :

- a) Siasat perang
- b) Ilmu siasat
- c) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Dalam kegiatan ekonomi strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Definisi lain strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka yang dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

⁷ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 859-860.

Jadi, manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarahkan pada penyusunan suatu strategi\sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi dalam upaya pencapaian tujuan karena pemimpin setiap organisasi berusaha berupaya mencapai tujuan tertentu, tetapi apapun tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, manajemen strategis adalah suatu proses terpenting untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Tahap-tahap Manajemen Strategis

a) Identifikasi mandated dan misi organisasi

Mandate merupakan apa yang diharuskan dan diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya termasuk yang diharapkan oleh masyarakat local sendiri. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang untuk organisasi atau lembaga didirikan atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga. Mandate inilah yang digunakan sebagai titik tolak dalam mengukur kinerja organisasi itu.

Langkah pertama dalam perencanaan strategis ini dimaksudkan untuk mempertegas kembali apa yang sebenarnya. Pengidentifikasian ini dilakukan dengan mengkomparasikan antara peraturan perundangan yang berlaku dengan pandangan *steakholders*.

Mengingat perumusan dan penyusunan suatu strategi penelitian ini menggunakan model manajemen strategi, maka dalam menganalisa data digunakan urutan proses analisis yang mengacu pada model tersebut yang dalam hal ini di bagi dalam beberapa tahapan proses sebagai berikut :

b) Analisis Lingkungan Strategis

Bryson (1995) menyatakan bahwa untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungannya, organisasi public harus memahami lingkung eksternal dan internalnya sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang efektif yang mengaitkan kedua lingkungan tersebut.⁸

1. Arti Umum Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini dapat menempatkan situasi dan kondisi sebagai factor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing dan juga analisa SWOT ini ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin sedang dihadapi oleh organisasi.

Analisis SWOT digunakan untuk melihat sejauh mana Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) dari pengembangan kepariwisataaan.

Analisis ini terbagi menjadi empat komponen dasar yaitu⁹ :

1. Kekuatan (*Strenght*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.
2. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan atau kekurangan dari organisasi atau program pada saat ini.,

⁸ John M Bryson, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hal.55.

⁹ CM Lingga Purnama MM *Strategic Marketing Plan* PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta

3. Peluang (*Opportunities*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan
4. Ancaman (*Threats*) adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

2. Analisis SWOT terbagi menjadi dua lingkup:

- a) Lingkup Internal yaitu lingkup yang berada didalam organisasi\kebijakan yang mempengaruhi dalam strategi pengembangan Dinas Pariwisata khususnya wilayah Pangkalpinang dan juga untuk mengamati kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bidang Pariwisata dapat memonitor pada sumber daya yang dimiliki, strategi yang digunakan sekarang dan kinerja
- b) Lingkup Eksternal yaitu Analisis terhadap lingkungan diluar organisasi atau daerah (eksternal) dimaksud untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Bidang Pariwisata dalam mengembangkan potensi.

Pemahaman atas lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan (strength) kelemahan (weakness) sedangkan lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Pemahaman atas kondisi kedua lingkungan tersebut digunakan sebagai pijakan analisis SWOT.

Dengan begitu proses perencanaan strategi akan lebih lengkap dengan analisis strategis SWOT akan lebih bisa diperlukan sebagai alat ukur memfokuskan perhatian dan kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki guna

mengoptimalkan system & organizational improvement tanpa mengurangi Kekuatan yang dimiliki atau Peluang sukses yang ada/existing opportunities), misalnya dengan memulai dari perbaikan prosedur kerja dan struktur organisasi tanpa perlu mengurangi SDM yang ada, jika memang sebenarnya kualitas SDM tersebut telah cukup baik. Analisis setiap Ancaman (Threat) dibalik langkah-langkah yang akan dilaksanakan, dan optimalkan sumberdaya yang ada pada divisi tersebut untuk meminimalkan resiko. Jadi SWOT adalah alat analisis strategi dan keunggulan bersaing, yang paling sederhana dan paling umum digunakan dalam perencanaan strategis.

c) Analisis Isu Strategis

Pengidentifikasian isu strategis merupakan inti dari perencanaan strategis. Karena isu strategis pertanyaan, kebijakan mendasar yang harus ditemukan jawabannya dalam upaya mewujudkan mandated dan misi organisasi. Dalam mengidentifikasi isu strategis studi ini menggunakan pendekatan langsung (*the direct approach*) dengan langkah sebagai berikut :

- a) Mempelajari visi dan misi
- b) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman
- c) Mengidentifikasi isu-isu strategisnya

d) Analisis Critical Isu Strategis

Proses mengidentifikasi isu strategis merupakan proses yang cukup rumit, sehingga diperlukan berbagai pengujian lebih lanjut terhadap isu-isu strategis yang lebih berhasil diidentifikasi, karena bukan tidak mungkin isu itu tidak cukup strategis. Untuk itu diperlukan untuk alat ukur/tes untuk melihat seberapa

strategis isu tersebut, sehinggaterjaring isu-isu yang benar-benar strategis (*critical strategis issues*).

2. Pemerintah Kota

Salah satu kerangka dasar yang terjadi kelengkapan bagian dari pemerintah daerah yaitu adanya suatu wadah atau tatanan bahwa daerah tersebut menyelenggarakan kebijakannya berdasarkan atas otonomi daerah yang demokrasi. Secara khusus Pemerintah Kota dalam artiannya suatu wadah atau bagian dari pemerintah daerah yang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sehingga bisa melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang mempunyai sasaran kebijakan dan program yang akan dilaksanakan nanti dalam upaya menciptakan pemerintahan yang dinamis, kondusif, dan sejahtera. Pemerintah kota memiliki suatu kelebihan yang mendasar untuk mengurus rumah tangganya sendiri dibawah kewenangan pemerintah pusat yang nantinya akan menunjang peningkatan pembangunan daerah secara merata.

3. Pemerintah Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab pada daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁰

bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai bab susunan pemerintahan juga dapat dijelaskan oleh Undang-undang yang sama yang dalam pasal 14 yang berisi sebagai berikut :

¹⁰ Undang-Undang No. 32 tahun 2004 “ Tentang Pemerintah Daerah” Kesya utama Surchaya hal

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan¹¹

4. Otonomi Daerah

Otonomi pada dasarnya adalah merupakan hak atau wewenang untuk mengatur dan memerintah daerah atas inisiatif dan keamanan sendiri. Dimana daerah diberikan kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan

¹¹ Ibid Hal 11

V

daerah dan dengan pembiayaan sendiri. Kebebasan yang diberikan bukanlah merupakan suatu kemerdekaan daerah yang terlepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi merupakan kemandirian yang berwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Otonomi daerah dalam menjalankan segala urusan yang ada di daerah menurut kemampuan sendiri sesuai dengan potensi-potensi yang ada menurut daerahnya sendiri.

Adapun Otonomi Daerah menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 pasal 1 poin H adalah :

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Daerah Otonomi menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 pasal 1 poin 6 adalah :

Masyarakat otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Melihat pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah upaya optimalisasi potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, karena pemerintah pusat mempunyai tugas-tugas yang cukup banyak, dan urusan-urusan yang bersentuhan dengan rakyat sedikit banyak akan terbengkalai, oleh karena itu daerah yang mengetahui potensi-potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan penduduk daerah

6. Manajemen Keuangan Daerah

Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita akan pentingnya menggagas kembali konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali system otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktis penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah-langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan local bangsa Indonesia berupa ancaman diintegrasikan bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Secara garis besar manajemen keuangan daerah adalah perubahan paradigma anggaran daerah untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut ialah :

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan public.

2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah.
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional dan siklus anggaran.
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait
6. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Pada saat ini sector wisata adalah salah satu sector yang menjadi andalan pemerintah didalam memperoleh devisa yang besar. Kondisi tersebut akan tampak jelas apabila kita mencermati pada objek-objek wisata Pantai Pasir Padi dan Pantai Tanjung Bunga yang ada di Kota Pangkalpinang. Tujuan akhir yang ingin dicapai tiada lain adalah tujuan ekonomi yaitu didalam mendatangkan Pendapatan (uang) bagi daerahnya, atau dapat dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a) Hasil pajak daerah
- b) Hasil retribusi daerah
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

d) Dana perimbangan

e) Pinjaman daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting di bandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa, dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah kota juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah yang salah satunya dalam bidang pengembangan kepariwisataan.

7. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya¹². Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal ditempat yang mereka tuju dan fasilitasnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengelola kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama didaerah tujuan wisata dan bagaimana agar wisatawan lebih menikmati lingkungan sekitar dengan nyaman selama melakukan perjalanan wisata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan oleh seseorang atau lebih, dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan ketenangan dan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu.

¹² Murni dan Haryati, S. H. "Pariwisata dan Pengembangan" ALFA BETA, Bandung, 2000, hal 13

Kepariwisataan merupakan suatu pemahaman dan pendekatan multidimensi dengan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kehidupan dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbeda, sehingga tidaklah berlebihan apabila pendefinisian kepariwisataan sulit dilaksanakan.

Sifat dasar dari kepariwisataan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepariwisataan timbul di luar penerahan manusia dan tempat tinggalnya dengan tujuan yang berbeda-beda
2. Ada dua elemen dalam kepariwisataan, yaitu tujuan perjalanan dan lama tinggal wisatawan ditempat wisata
3. Merupakan Perjalanan dengan meninggalkan tempat asalnya dan tinggal disuatu tempat yang memberikan suasana yang berbeda
4. Lama tinggal disuatu tempat wisata bersifat sementara dan dalam waktu yang pendek untuk kemudian kembali ketempat asalnya

8. Manfaat Pariwisata

Manfaat pariwisata didalam pembangunan mencakup beberapa segi yaitu :

a. Segi Ekonomi

Bahwa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperluas dasar-dasar perekonomian suatu Negara.

b. Segi Seni Budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah untuk mengetahui, mengagumi, mengagumi atau mengalami seni budaya

c. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup. Sebaliknya apabila dibina secara baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan yang baik ataupun dapat memanfaatkan lingkungan alam yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan untuk rekreasi menginginkan daerah yang menimbulkan suasana baru dari kebisingan kehidupan sehari-hari

d. Memperluas Nilai-nilai Pergaulan Hidup dan Pengetahuan

Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain manusia akan menghargai nilai-nilai yang dimilikinya

e. Memperluas Kesempatan Kerja

Industri pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap kebutuhan tenaga kerja, tidak hanya mementingkan mesin-mesin saja, sebagai industri yang sifatnya melayani, maka disamping membutuhkan unsure cepat, aman, mudah, murah dan nikmat juga ramah.

f. Menunjang Perbaikan Kesehatan dan Prestasi Kerja

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walaupun untuk sementara waktu artinya dengan adanya wisata para wisatawan bisa lebih rileksasi menghilangkan stress setelah sepekan bekerja¹³

¹³ Direktorat Jenderal Pariwisata, "Pengantar Pariwisata Indonesia", Jakarta hal 29

9. Sasaran Pariwisata

Sasaran pariwisata ditujukan pada masyarakat umum atau luas sehingga sasaran pariwisata bagi masyarakat luas dapat menjadi dua bagian, yaitu :

1). Bagi wisatawan dalam negeri (domestic)

Ialah bahwa sasaran pariwisata ini khususnya ditujukan bagi masyarakat didalam negeri itu sendiri

2). Bagi masyarakat luar negeri (mancanegara)

Ialah sasaran pariwisata ditujukan pada objek-objek wisata yang ada dengan menonjolkan kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Adapun sarana dan prasarana pariwisata di Kota Pangkalpinang, ditujukan bagi masyarakat dalam negeri (domestic) dan wisatawan mancanegara, yaitu dengan memperkenalkan atau menunjukkan suatu daya tarik yang baru yang belum pernah dilihat oleh wisatawan yaitu keindahannya.

9. Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan suatu usaha industri yang perlu di kembangkan, sejalan dengan besarnya pendapatan atau devisa Negara yang diperoleh dari sector satu ini. Pendapatan diatas apabila kita analisis lebih jauh tertuang pada Inpres No.9 1969 pasal 3. adapun isinya sebagai berikut : *“ Usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara “*.¹⁴

¹⁴ Anonim. Kumpulan Peraturan Bidang Kepariwisataan, Din. Pariwisata Jateng, 1985, hal. 15

Setelah kita mencermati lebih mendalam maka tergambar oleh kita bahwa usaha pengembangan sector pariwisata tidaklah untuk mencapai satu tujuan akan tetapi banyak sekali tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai. Menurut Inpres diatas pula tujuan-tujuannya terbagi atas tiga point, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan Negara dan masyarakat pada umumnya serta perluasan lapangan industri lainnya.
2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
3. Meningkatkan persaudaraan dan persahabatan nasional dan internasional agar terjalin lebih erat dalam hubungan kepariwisataan.

Seluruh tujuan-tujuan pengembangan pariwisata (objek wisata) tersebut sangat tepat sekali namun disini kita juga mengetahui mengenai makna dari pengembangan objek wisata. Pengembangan sector yang satu ini khususnya dinegara Indonesia tidaklah pemerintah dapat menjalankan dengan sendirinya akan tetapi pemerintah pun harus berusaha memberikan motivasi, rangsangan maupun support dalam mewujudkan peran masyarakat secara aktif. Implementasinya yaitu proses pengembangan pariwisata tersebut dapat dilaksanakan dan membuahkan hasil secara menyeluruh, tidak hanya dirasakan juga oleh masyarakat.

Pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata meliputi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan terhadap lima unsur, yaitu :

- b) Prasarana wisata
- c) Sarana wisata
- d) Tata laksana/infrastruktur
- e) Masyarakat/lingkungan.¹⁵

Objek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup sendi budaya, sejarah bangsa, tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Objek dan daya tarik wisata yang dikembangkan bisa merupakan objek wisata alam yang dikelola, wisata argo, wisata tirta, taman rekreasi, tempat hiburan, dan peninggalan sejarah.

Prasarana wisata adalah mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam kunjungannya seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, transportasi, dan sebagainya. Pembangunan prasarana wisata harus diarahkan pada upaya meningkatkan daya tarik objek wisata tersebut.

Kondisi tersebut akan tampak jelas apabila kita mencermati pada objek-objek wisata serta kebiasaan masyarakat yang ada didaerahnya, diantaranya objek wisata Pantai Pasir Padi dan Kawasan Tanjung bunga yang ada dikota Pangkalpinang. Tujuan akhir yang ingin dicapai tiada lain adalah tujuan ekonomi yaitu sebenarnya didalam mendatangkan pendapatan (uang) bagi daerahnya, atau dapat dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari sector pariwisata pemerintah dapat memperoleh pemasukan dari ;

1. Tiket masuk pengunjung

2. Retribusi parkir wisata

Untuk menambah dan meningkatkan PAD ini maka pihak pemerintah kota perlu ada pengembangan system pariwisata atau objek wisata yang ada didaerahnya. Pengembangan strategi objek wisata ini dapat dilakukan pada dua segi, yaitu :

Dari segi fisik

- a) Membangun sarana dan prasarana pariwisata dilokasi objek wisata
- b) Melengkapi sarana dan prasarana pariwisata yang sudah ada dilokasi objek wisata.

Dari segi non fisik

- a) Meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung, dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola objek wisata
- b) Memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang ada didaerah sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung
- c) Memperhatikan sesuatu yang khas yang ada didaerah seperti makanan khas, kerajinan-kerajinan khas. Adanya pengembangan ini juga akan mendorong timbulnya industri-industri pariwisata yang dapat menunjang kenyamanan bagi para pengunjung seperti berdirinya tempat-tempat hiburan, retoran-restoran, biro-biro perjalanan, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar lokasi objek wisata karena tenaganya diserap oleh industri pariwisata tersebut¹⁶

¹⁶ Oka A. Yoeti, "*Pemasaran pariwisata*", Penerbit Angkasa Bandung, 1985, hal 46.

Berbekal dari penjelasan diatas mengenai pengembangan objek wisata terlihat tampak dengan jelas pengembangan melalui dua segi dapat memberikan dorongan yang amat menjanjikan sebagai strategis perwujudan pengembangan pariwisata kearah yang lebih baik. Disamping itu juga usaha untuk mengembangkan objek wisata, pemkot dapat melakukan langkah-langkah kongkrit yang pasti berguna memperkenalkan pada masyarakat mengenai keberadaan objek wisata tersebut. Adapun bentuk unit pelaksanaan teknis tersebut dinamakan Pusat Informasi Wisata dan Promosi (PIWP). Dengan adanya promosi seperti ini maka daerah tersebut dapat dikenal secara luas, baik tentang keindahannya, kebudayaannya maupun khasnya ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang ada di objek wisata tersebut.

Sarana dan prasarana baik dari segi fisik maupun non fisik yang lengkap serta didukung adanya promosi yang gencar, maka wisatawan akan tertarik untuk datang dan berkunjung ke lokasi objek wisata tersebut dan pengunjungpun akan merasa nyaman dan betah, karena didukung oleh sarana yang memadai. Setelah kita mengetahui penjelasan diatas maka terbayang keintensifan proses promosi wisata, baik melalui berbagai macam cara yang sangat membantu guna membangun objek wisata tersebut.

Pada masa sekarang dan yang akan datang sudah saatnya Negara kita mengembangkan bisnis pariwisata, dengan tujuan mendatangkan devisa dan investasi asing agar turut andil didalam mengembangkan objek wisata yang ada nusantara.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep yang lain agar tidak terjadi. Kesalahpahaman definisi konsepsional yang merupakan suatu pengertian dari kelompok dan gejala yang menjadi pokok perhatian maka berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa definisi konsepsional yang dapat kami berikan didalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah ialah bagian dari pemerintahan suatu Negara yang berdaulat yang dibentuk secara politik berdasarkan suatu undang-undang yang mempunyai lembaga-lembaga/badan-badan yang menjalankan roda pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada diwilayah kekuasaannya.
2. Pemerintah Kota ialah suatu wadah atau bagian dari pemerintah daerah yang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
3. Pengembangan Pariwisata adalah pengenalan nilai budaya bangsa dan meningkatkan kebudayaan nasional dengan memperhatikan tetap terpeliharannya kebudayaan bangsa, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta merupakan pembangunan pariwisata dilakukan secara

menyeluruh dan terpadu dengan sector lain serta antar pengusaha pariwisata agar mereka dapat saling menunjang.

4. Manajemen Strategis yaitu sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk mencapai sasaran perusahaan
5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut
6. Otonomi Daerah adalah merupakan hak atau wewenang untuk mengatur dan memerintah daerah atas inisiatif dan keamanan sendiri. Dimana daerah diberikan kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah dan dengan pembiayaan sendiri
7. Manajemen keuangan daerah adalah perubahan paradigma anggaran daerah untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.
8. Peran Kantor Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah Menyusun program, merumuskan kebijakan teknis, memberikan izin dibidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan strategis Pemerintah Daerah
9. Fungsi Kantor Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan

10. Peran Kepala Dinas Pariwisata adalah melaksanakan pembinaan, memfasilitasi penyelenggaraan, memberdayakan sumber daya aparatur dan mitra dibidang Kebudayaan dan Pariwisata

11. Fungsi Kepala Dinas Pariwisata adalah penggalangan investasi Pariwisata Daerah, koordinasi kegiatan umum pembinaan kepariwisataan dan Pemberdayaan SDA dan SDM pariwisata diberbagai jalur

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian. Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variable diukur. Definisi operasional berfungsi mengetahui cara mengetahui suatu variable sehingga seseorang dapat mengetahui baik/buruknya suatu pengukuran.¹⁷

Indikator-indikator yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah strategi strategi pengembangan pariwisata di kota Pangkalpinang dilihat dari strategi yang dipilih adalah :

1. Analisis SWOT .

1. Kekuatan (*Strenght*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.yang Dan kekuatan yang dimiliki kota Pangkalpinang dalam mengembangkan pariwisata antara lain:
 - a) Adanya kebijakan Pemerintah Kota dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan PAD
 - b) Sarana dan Prasarana yang mendukung perkembangan dibidang pariwisata
 - c) Adanya Undang-undang No.5 tahun 1992 tentang perlindungan Benda Cagar Budaya
 - d) letaknya OTDW rata-rata dekat dengan pusat kota-pusat kota
 - e) RIPPDA sudah disusun
 - f) dukungan tokoh masyarakat, DPRD, dan bisnis local.

¹⁷ Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian sosial* Bumi Aksara , Jakarta.

2. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan atau kekurangan dari organisasi atau program pada saat ini. Dan kelemahan yang dimiliki kota Pangkalpinang dalam mengembangkan pariwisata antara lain:
 - a) Pengelolaan objek-objek wisata yang kurang memadai.
 - b) Lamanya proses penerbitan Peraturan Daerah dalam hukum operasional usaha kepariwisataan
 - c) Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat dan pengusaha pariwisata mengenai izin usaha
 - d) Masih kurangnya sarana dan prasarana di objek wisata Pantai Pasir padi
 - e) Kurangnya dukungan moral para birokrak dalam pengembangan seni daerah.
3. Peluang (*Opportunities*) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Dan peluang yang dimiliki kota Pangkalpinang dalam mengembangkan pariwisata antara lain:
 - a) Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengembangkan dan membangun potensi dan aset terbesar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b) Dengan adanya peningkatan keamanan daerah yang terkendali sangat membantu para investor untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata
 - c) Adanya kemajemukan masyarakat pangkalpinang yang selalu siap terbuka menerima budaya dari luar yang dapat beralkulturasi dengan seksama
 - d) Masyarakat Pangkalpinang sangat antusias pada kegiatan baik itu seni dan budaya
 - e) Tersedianya SDM yang mampu berkarya
4. Ancaman (*Threats*) adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Dan peluang yang dimiliki kota Pangkalpinang dalam mengembangkan pariwisata antara lain:
 - a) Pengelolaan objek-objek wisata yang kurang memadai.
 - b) Lamanya proses penerbitan Peraturan Daerah dalam hukum operasional usaha kepariwisataan
 - c) Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat dan pengusaha pariwisata mengenai izin usaha
 - d) Masih kurangnya sarana dan prasarana di objek wisata Pantai Pasir padi
 - e) Kurangnya dukungan moral para birokrat dalam pengembangan seni daerah

2 Strategi yang digunakan dalam pengembangan kepariwisataan melalui

1. Aspek Pengembangan fisik

a) Dilihat kelengkapan sarana dan prasarana

2. Aspek Pengembangan Non Fisik

a) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

b) Promosi kebudayaan dan kuliner

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat penyandaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat *populasi*.¹⁸ Dari perseptif tujuan yang akan dicapai penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan secara sistematis dari situasi, problem, pelayanan atau program, penyediaan, informasi tentang kondisi kehidupan masyarakat atau penggambaran mengenai sifat dan isu-isu tertentu.

2. Unit Analisa Penelitian

. Unit analisa merupakan unit-unit yang terlibat secara langsung didalam analisis penelitian, antara lain unit penelitian yang terlibat yaitu Kantor Dinas Pariwisata dengan unit-unit yang terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Pusat Informasi Wisata dan Promosi dan Bidang Bina Wisata.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan pada kantor Dinas Pariwisata Pemerintah Kota
Danhalimaa dengan tujuan untuk mengungkap strategi yang digunakan oleh

Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menggali potensi pariwisata daerah untuk menghadapi persaingan yang semakin kompleks.

Sedangkan alasan penulis dalam memilih lokasi penelitian di Kota Pangkalpinang karena di kota Pangkalpinang mempunyai beberapa objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti objek wisata Pantai Pasar Padi Pantai Tanjung Bunga, Grimaya Golf, Museum Timah, Taman Sari, dan Monumen Tugu Kemerdekaan dan juga adanya kemajuan dalam pembangunan dalam bidang kepariwisataan walaupun belum secara optimal.

4. Tehnik Pengumpulan Data.

Dalam usaha mengumpulkan data yang tepat, data yang diperlukan dalam objek penelitiannya penulis akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Data Primer

1. Interview/wawancara

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan dengan mewancarai orang terlibat secara langsung dengan aktivitas yang dihadapi penelitian, dengan mewancarai langsung kepada responden yaitu dinas pariwisata kota Pangkalpinang.

2. Observasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data primer yaitu melakukan

Data Sekunder

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari sumber sekunder, data tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk dokumen. Data tersebut antara lain berupa publikasi pemerintah, laporan hasil kegiatan dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Sesuai jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, maka data yang diperoleh dari penelitian tersebut di analisa dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif Yang dimaksud analisa data kualitatif menurut Faried Ali adalah :

Analisa data kualitatif adalah suatu analisis yang didasarkan pada argumentasi kualitatif logika. Namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan melalui kegiatan teknik perolehan data¹⁹.

kegiatan perolehan data dilakukan melalui studi lapangan maupun studi pustaka, dimana dalam proses penganalisaannya tidak berdasarkan pada perhitungan kuantitatif tetapi pada kemampuan analisis peneliti dalam menghubungkan fakta data dan informasi untuk menghasilkan suatu teori.

Menurut Patton Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar²⁰. Dalam penelitian ini, proses analisa data yang dilakukan sebagai berikut :

¹⁹ Ali, Faried, *Methodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, T. T Raja Drafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 151

²⁰ John Patton, *Teknik Analisis Data dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta 2002, hal 103

- a) Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber (wawancara, pengamatan serta data sekunder)
- b) Menyusun data guna menemukan hubungan antara data memungkinkan untuk disusun kedalam satuan-satuan yang dikategorikan
- c) menyusun data secara tertulis
- d) Menganalisa data yang ada dan memahaminya untuk menghasilkan kesimpulan sekaligus rekomendasi